BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena terorisme merupakan ancaman global yang serius dan terus berkembang dan mengancam keamanan internasional, nasional dan individu. Tindak pidana terorisme sebagai bentuk radikalisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) juga kejahatan terhadap manusia (*crimes against humanity*) yang menjadi kecaman seluruh negara.¹ Selain itu, terorisme termasuk kejahatan internasional karena memiliki potensi bahaya terhadap keamanan dan mengganggu perdamaian dunia.² Ini disebabkan terorisme menggunakan metode yang menakutkan, membahayakan, juga mengakibatkan kematian bagi warga sipil.³ Dengan demikian, terorisme termasuk dalam tindak pidana berat yang bisa merusak tatanan negara dan bangsa.

Definisi terorisme tidak dapat disamakan secara universal. Ini disebabkan pengaruh bagaimana suatu peristiwa dikategorikan sebagai terorisme.⁴ Pengaruh terorisme yang sudah terjadi ribuan tahun lalu menimbulkan dampak secara

¹ Muhammad Ali Zaidan, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)," *Law Research Review Quarterly* 3, no. 2 (31 Mei 2017): hlm 105, <https://doi.org/10.15294/snh.v3i1.20932>.

² Febby Nurfadilla dkk., "Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 16 (12 Agustus 2023): hlm 276, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8240254>.

³ Aulia Rosa Nasution, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (17 Oktober 2018): hlm 10, <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.134>.

⁴ Usman, *Radikalisme, Terorisme, Dan Deradikalisasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm 76.

psikologis, ekonomi, sosial dan politik. Beberapa dampak tersebut antara lain: pertama, gerakan terorisme dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia yang masif. Kedua, terorisme membawa kerugian material yang besar. Ketiga, tindakan terorisme juga memiliki dampak psikologis yang luar biasa pada setiap orang. Rasa takut, cemas, dan ketidakamanan yang dihasilkan oleh ancaman teroris dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui media. Keempat, gerakan terorisme juga memiliki dampak hukum (yuridis) yang signifikan.⁵ Dampak yang ditimbulkan begitu besar sehingga dapat merusak tatanan generasi berikutnya. Semua negara setuju untuk melawan terorisme, karena bertentangan dengan kemanusiaan dan kerugian secara ekonomi, politik dan psikologi.⁶ Kejahatan terorisme tidak hanya merendahkan martabat negara dan bangsa, tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban dari masyarakat yang tidak bersalah sebab tidak terbatas oleh waktu, tempat dan target.⁷ Terlebih tindak pidana terorisme digambarkan sebagai serangan yang dilakukan secara sengaja terhadap ketertiban dan keamanan publik.⁸ Maka perlu membangun kesadaran bela negara

⁵ Zuly Qodir, "Peran Negara Dan Agama Dalam Memerangi Terorisme," *Jurnal Orientasi Baru* 21, no. 1 (2012):hlm 101–2.

⁶ Reni Windiani, "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme," *Jurnal Ilmu Sosial* 16, no. 2 (18 Juli 2018):hlm 135.

⁷ Andi Najemi, Mohamad Rapik, dan Rosmidah Rosmidah, "Remission for Terrorist Convicts: Challenges and Solutions to the Indonesian Law," *Jambe Law Journal* 5, no. 1 (2022):hlm 77, <https://doi.org/10.22437/jlj.5.1.67-79>.

⁸ I. Ketut Astawa dan Daud Munasto, "Tindakan Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption Of Innocent Dan Ham," *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (31 Januari 2022):hlm 8, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5302>.

dalam menghadapi isu-isu terorisme agar dapat mempertahankan kedaulatan dan ketahanan nasional.⁹

Keberlanjutan terorisme yang tanpa henti terus menjadi permasalahan besar bagi dunia sehingga perlu diperangi oleh pemerintah dunia.¹⁰ Permasalahan aksi teror yang berlanjut di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir¹¹ dilakukan sebagian besar oleh kelompok ekstrem kanan dengan melakukan kekerasan dan teror berdasarkan pemahaman keagamaan mereka. Kelompok teroris yang mempunyai paham radikal agama seperti *Islamic State Iraq and Syria* (ISIS) yang dideklarasikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi tahun 2013 di Suriah menjadi kelompok jihad dengan memerangi Suriah dan membentuk militer kuat di Irak. Tujuan kelompok ini untuk membuat negara Islam dengan cara melakukan kekerasan seperti membunuh dan menghancurkan. Hal ini menjadi ancaman serius bagi negara di dunia disebabkan paham radikal yang ekstrem sehingga negara Amerika Serikat, Prancis dan Belanda melakukan penolakan melalui serangan udara bom pada tanggal 2 Oktober 2014.¹² Namun ISIS tetap menyebarkan ideologinya, dengan mengincar Indonesia sebagai tempat strategis yang dapat meningkatkan radikalisme. ISIS memanfaatkan Indonesia yang mayoritas

⁹ Ferdy Ieorocha dkk., "Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme Yang Mengarah Pada Terorisme," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (10 April 2023): hlm 172, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4723>.

¹⁰ Firad Wijaya, "Terorisme: Kritik Terhadap Paradigma Psikologi Barat Dalam Perspektif Islam," *Nahdlatain: Jurnal Kependidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (31 Januari 2022): hlm 53, <https://doi.org/10.51806/nahdlatain.v1i1.67>.

¹¹ Saifudin Asrori, "Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 1 (10 Juli 2019): hlm 119, <https://doi.org/10.30984/ajip.v4i1.911>.

¹² Nur Azizah, Data Yaumis Shofa, dan Depict Pristine Adi, "Respon Pemerintah Indonesia Dalam Menyikapi Keberadaan ISIS Di Indonesia," *JRP (Jurnal Review Politik)* 10, no. 1 (1 Juni 2020): 126, <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.1.116-140>.

beragama Islam sehingga ISIS dapat mengumpulkan tentara dalam membangun negara Islamnya.¹³

ISIS melakukan gerakan radikalisme melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.¹⁴ Radikalisme Islam menyebarkan pahamnya melalui laman *online*, portal *online* dan video yang sengaja digunakan untuk sarana komunikasi yang strategis sebab bisa bersifat anonim, jangkauan yang luas dan biaya yang rendah. Dengan begitu ISIS dapat menyebarkan ideologi kekerasan, kebencian dan membuat paham negara Islam.¹⁵ Melanjutkan hal tersebut, ISIS melakukan perekrutan melalui Youtube dengan durasi delapan menit yang berjudul “*Join The Ranks*” berisikan untuk berjihad akhirnya mulai bermunculan komunitas yang mendukung ISIS seperti di Jakarta, Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Surakarta, Sukoharjo dan Karanganyar.¹⁶ ISIS memiliki kriteria dalam perekrutannya, seperti: mayoritas laki-laki; usia 16 sampai 35 tahun; minim pengetahuan mengenai Islam; tingkat ekonomi yang beragam; dan pendidikan SMA atau MAN atau pondok pesantren.¹⁷ Namun ISIS juga memiliki strategi propaganda perekrutan melalui dua cara yaitu *official propaganda* dan *unofficial*

¹³ Dina Oktarina dan Adhiatma Nanda Wardhana, “Jihad Melawan Ideologi Radikal Isis Di Indonesia,” *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations* 1, no. 2 (4 Desember 2016): hlm 187–88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4626211>.

¹⁴ Agung Sukoco, Muhamad Syauqillah, dan Asep Ismail, “Media, Globalisasi Dan Ancaman Terorisme,” *Journal of Terrorism Studies* 3, no. 2 (11 November 2021), <https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1039>.

¹⁵ Achmad Sulfikar, “Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia,” *Jurnal Jurnalisa* 4, no. 1 (2018):hlm 78, <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5622>.

¹⁶ Joko Tri Haryanto, “Perkembangan Gerakan Isis Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS Di Surakarta),” *Harmoni* 14, no. 3 (30 Desember 2015):hlm 3.

¹⁷ Eni Susanti, Andi Ismira, dan Sadriani, “Analisis Propaganda Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Di Indonesia Melalui Jalur Media Sosial,” *Hasamuddin Journal of International Affairs* 3, no. 2 (3 Agustus 2023):hlm 124, <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27663>.

propaganda. *Official propaganda* melalui materi dari media resmi milik ISIS yaitu AL-HAYat Media Center, sedangkan *unofficial propaganda* melalui pendukung dari penjurur dunia. Setelah itu, ISIS melanjutkan propaganda melalui metode ancaman dan kekerasan serta ajakan dengan penyampaian pesan yang menarik melalui pendekatan personal.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, ISIS tertarik untuk merekrut calon anggota berusia muda atau remaja yang tidak memiliki pemahaman tentang Islam juga jati dirinya sehingga ISIS dapat memberi tekanan psikologis dan membuat para calon berpotensi menjadi anggota ISIS.

Setelah perekrutan, ISIS melakukan salah satu aksi teror di Indonesia yaitu pengeboman Thamrin pada Kamis, 14 Januari 2016. Dalam serangan ini, setidaknya ada delapan orang, termasuk empat pelaku dan empat warga sipil, dilaporkan tewas dan 34 orang mengalami luka-luka.¹⁹ ISIS melakukan penyerangan melalui simbol dari negara Amerika Serikat seperti Starbuck dan juga simbol keamanan Indonesia yaitu Polisi.²⁰ Selain itu, terjadi penyerangan aksi bom bunuh diri di gereja Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018. Dalang dari kerusuhan ini adalah bagian dari JAD (*Jamaah Anshorut Tauhid*) yang berafiliasi dengan ISIS dibawah kepemimpinan Aman Abdurrahman. Dari aksi ini terdapatkan sedikitnya

¹⁸ Santi Dwi Putri dan Fendy Eko Wahyudi, "Cyber terrorism: Strategi propaganda dan rekrutmen ISIS di Internet dan dampaknya bagi Indonesia tahun 2014-2019," *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 5, no. 4 (2019): hlm 830–31.

¹⁹ Dedy Tabrani, "Penanganan Teror Bom Thamrin Ditinjau Berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP) Bom," *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 2: hlm 206, diakses 29 Agustus 2024, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3989407>.

²⁰ Asep Setiawan, "Kebijakan Pencegahan Gerakan Isis Di Indonesia: Pendekatan System Dynamics," *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 1, no. 1 (12 April 2018): hlm 83, <https://doi.org/10.33822/mjih.v1i1.284>.

11 orang tewas dan 41 orang terluka.²¹ Merujuk kasus pengeboman gereja di Surabaya, faktanya anak-anak terlibat dalam aksi terorisme tersebut. Ini merupakan fenomena yang berbahaya karena anak telah diradikalisasi sejak usia dini melaksanakan aksi terorisme.²² Berdasarkan kedua kasus ini, penulis menyimpulkan bahwa kelompok terorisme tidak peduli pada keselamatan orang lain terlebih anak-anak yang menjadi penerus bangsa. Gerakan ini menghancurkan generasi muda dan melakukan penyerangan dengan begitu berani demi mempertahankan paham radikal ekstremnya pada dunia.

Perkembangan globalisasi telah mengubah dinamika terorisme dengan memperluas jangkauannya dan membuat lebih sulit diatasi.²³ Beragam macam pembaharuan teknologi dapat memberikan kemungkinan masuknya ideologi model baru. Ini disebabkan media dapat digunakan dengan cara yang mudah dan memiliki akses yang cepat sehingga berpotensi untuk mempengaruhi pengguna media.²⁴ Maka teroris dapat menyebarkan propaganda yang luar biasa dan merencanakan serangan. Sebagaimana hal tersebut, terjadi pemicu adanya

²¹ Hendro Wicaksono, "Analisis Kriminologis: Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya," *Deviance Jurnal Kriminologi* 2, no. 2 (1 Desember 2018): hlm 89-90, <https://doi.org/10.36080/djk.912>.

²² Mohamad Rapik dan Bunga Permatasari, "Penanganan Anak ISIS Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): hlm 294, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.289-314>.

²³ Muhammad Arif Setiawan, "Kriminalisasi Terorisme Di Indonesia Dalam Era Globalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 21 (2002): hlm 82, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art6>.

²⁴ Anisa Pebrianti, "Penyebaran Paham Radikal Dan Terorisme Dalam Media Internet," *Journal SOSIOLOGI* 3, no. 2 (2 November 2020): hlm 78, <https://doi.org/10.59700/jsos.v3i2.1051>.

perkembangan bentuk terorisme,²⁵ salah satunya adalah aksi *lone-wolf* dalam dunia terorisme.

Aksi *lone-wolf* berbeda dengan aksi yang dilakukan ISIS secara berkelompok. Istilah *lone-wolf* beroperasi secara individu, dan tidak terikat dengan organisasi atau kelompok dengan modus operasi tanpa komando.²⁶ Fenomena *lone-wolf terrorism* telah berkembang di Eropa dan Amerika Serikat dan menjadi ancaman baru di Indonesia.²⁷ Salah satu aksi *lone-wolf* yang terkenal adalah Theodore Kaczynski seorang pembunuh berantai rasis yang melakukan 16 pengeboman dalam waktu 17 tahun pada era 9/11.²⁸

Indonesia juga mengalami pergeseran aksi terorisme ini seperti kasus terorisme pada tanggal 15 Maret 2010, terjadi penembakan terhadap seorang anggota polisi, Briptu Yona Anton Setiawan yang tewas akibat serangan terorisme. Selain itu, pada 10 April terjadi penembakan terhadap dua orang polisi yaitu Briпка Wagino dan Briptu Iwan Eko Nugroho yang tewas di Pos Polisi Kentengrejo Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang dilakukan oleh Yuli Harsono.²⁹ Dinamika ini dapat dianalisis bahwa gerakan *lone-wolf* telah terjadi di Indonesia.

²⁵ Agus Subagyo, "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme," *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (14 April 2020): hlm 22, <https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1509>.

²⁶ Elma Haryani, "Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf" Pada Anak di Medan," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 18, no. 2 (30 Agustus 2020): hlm 146, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i2.710>.

²⁷ Tiara Firdaus Jafar, Arfin Sudirman, dan Affabile Rifawan, "Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman *Lone-wolf terrorism* Di Jawa Barat," *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 1 (9 April 2019): hlm 77, <https://doi.org/10.22146/jkn.41244>.

²⁸ Mark Hamm dan Ramon Spaaj, "*Lone-wolf terrorism* in America: Using Knowledge of Radicalization Pathways to Forge Prevention Strategies," t.t., hlm 5–6.

²⁹ Muhammad Subhan, "Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam Di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015)," T.T., hlm 63–64.

Maka ancaman ini ini perlu diwaspadai dan negara perlu mengamankan aksi ini dengan memperkuat ketahanan nasional.³⁰

Sebagaimana pada aksi kelompok teroris yang mematikan aksi *lone-wolf* juga tidak dapat dikesampingkan. Ini disebabkan dengan fakta bahwa pelaku tidak memiliki komunikasi pada tersangka sehingga dapat mempersiapkan dan mengeksekusi secara rahasia. Di waktu yang sama pelaku dapat bersembunyi sehingga *lone-wolf* dapat membuat ketakutan di mana-mana sebab tidak dapat diprediksi.³¹ Ancaman *lone-wolf* yang ditimbulkan semakin berbahaya bagi Indonesia terlebih pada era globalisasi teknologi dan menimbulkan pertanyaan bagaimana respons hukum dan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ancaman ini. Tingginya kesalahpahaman yang dihadirkan karena masalah radikalisme maka akan meningkatkan tingkat kejahatan yang tidak dapat diprediksi.³² Aksi *lone-wolf terrorism* jika diabaikan dan eksistensinya diteruskan akan menjadi ancaman bagi Indonesia.

Namun demikian, di Indonesia belum ada aturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang tindak terorisme yang dilakukan dengan modus *lone-wolf terrorism*. Sejauh ini ketentuan pidana di Indonesia mengatur secara umum hal-hal yang berkaitan dengan tindak terorisme. Sendiri atau berkelompok, atas

³⁰ Jafar, Sudirman, dan Rifawan, "Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman *Lone-wolf terrorism* Di Jawa Barat," hlm 78.

³¹ Anita Carolina, "Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 3 (2019):hlm 222, <https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.190>.

³² Alfiana Yuniar Rahmawati, "Terorisme Dalam Konstruksi Media Massa." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 2, no. 1 (28 Maret 2020): hlm 38-51, <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v2i2.9658>.

inisiatif sendiri maupun karena tuntutan dari organisasi yang sedang menjadi afiliator, pelaku teror merupakan seorang yang melakukan kejahatan besar.

Pada dasarnya, Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana terorisme secara khusus didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Tindak pidana terorisme melalui ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas termasuk dalam Pasal 6 yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Perbuatan dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 yaitu.³³ a) merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik; b) perbuatan dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum; dan c) menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang. Selanjutnya, unsur Pasal 6 yaitu, setiap orang artinya orang perseorangan, kelompok orang dan korporasi. Unsur dengan sengaja: menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massa; dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik juga fasilitas internasional. Pasal 6 adalah tindak pidana materiel yang artinya tindak pidana terorisme harus timbul akibatnya sebagaimana unsur Pasal 6.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 600 menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengalibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Mencermati persoalan di atas, penulis menemukan adanya kekosongan hukum terkait eksistensi aksi *lone-wolf* dalam perundang-undangan. Kategori *lone-*

³³ R. Wiyono, S.H., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 42.

wolf yang memiliki unsur perbuatan tersendiri sulit untuk ditentukan apakah termasuk dalam kategori terorisme ini secara umum atau khusus. Sementara itu, fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan *cyber attacks* sebab modus operandi *lone-wolf* melalui media sosial. *Lone-wolf* bukan hanya membahas tentang siapa pelaku atau kelompok dan juga jaringannya namun terkait dampak terorisme yang memiliki doktrin serta ideologi ekstrem dapat membahayakan kesadaran masyarakat secara luas. Upaya pencegahan terorisme secara umum memang telah dilakukan. Namun definisi dan cakupan terorisme masih belum mencakup pergerakan yang mungkin dilakukan oleh para *lone-wolf*. Demikian pula, aturan mengenai pergerakan *lone-wolf* belum ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka perlu peninjauan terhadap aksi *lone-wolf* dengan melihat dari prespektif perundang-undangan dan mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana pelaku *lone-wolf* dalam aksi terornya.

Aspek pertanggungjawaban pidana pelaku aksi *lone-wolf* ini menjadi penting diteliti sebagai cara untuk melihat dan membuktikan apakah di Indonesia terorisme yang dilakukan secara sendiri dan dilakukan secara bersama-sama dikenai sanksi yang sama atau berbeda. Pembuktian ini menjadi jalan untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur masalah *lone-wolf* ini.

Keberadaan *lone-wolf* merupakan fenomena terorisme yang perlu untuk diatur dalam peraturan hukum. Peraturan hukum ini penting sebagai sarana legalitas agar masalah *lone-wolf* ini mendapatkan kepastian dalam penanganannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang “ANALISIS AKSI *LONE-WOLF TERRORISM* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang penulis kemukakan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan skripsi skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana peraturan hukum yang berlaku saat ini dan perbandingan hukumnya dalam menyikapi aksi *lone-wolf terrorism*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana antara aksi *lone-wolf terrorism* dengan aksi kelompok terorisme?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan saat ini serta perbandingan hukum dalam aksi *lone-wolf terrorism*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana antara aksi *lone-wolf terrorism* dengan aksi kelompok terorisme.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat teoritis atau akademik, yaitu untuk menambahkan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan

dengan tindak pidana terorisme terkhusus mengenai aksi *lone-wolf* dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

- b. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penelitian hukum bagi penegak hukum maupun berbagai kalangan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran dari judul skripsi ini, penulis akan memberikan penjelasan pengertian-pengertian yang digunakan dalam skripsi ini yang menjadi kerangka konseptual, sebagai berikut:

1. Pengaturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan menurut ahli yaitu Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hierarki peraturan perundang-undangan ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan eksekutif (pemerintah) ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena

kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.³⁴

2. Pembuat (*dader*)

Batasan pengertian pembuat suatu tindak pidana telah diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

Setiap Orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana dapat terdiri dari beberapa kategori, yaitu: orang yang melakukan tindakan (*pleger*), orang yang memerintahkan tindakan tersebut (*doenpleger*), orang yang berpartisipasi (*medepleger*), serta orang yang memberikan dorongan, menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan kekerasan, atau yang mengajak (*uitlokker*). Semua pelaku tindak pidana ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁵

3. Terorisme

Pengertian terorisme dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15

³⁴ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), hlm 7.

³⁵ Ermans Elisa Nender, "Sanksi Hukum Bagi Yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Administratum* 11, no. 1 (9 Januari 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45367>.

Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Menurut Syed Hussein Alatas, teroris adalah individu atau kelompok yang menggunakan ketakutan sebagai alat untuk berkonflik dengan lawan mereka. Mereka melakukan serangan terhadap orang-orang yang tidak terlibat atau terhadap properti, tanpa mempertimbangkan aspek benar atau salah dari sudut pandang agama atau moral. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa segala tindakan dapat dibenarkan demi mencapai tujuan yang diinginkan dalam konteks persenjataan. Selain itu, terorisme memiliki karakteristik terorisme menurut James H. Wolfe sebagai berikut: Pertama, terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitik. Kedua, objek sasaran terorisme adalah sasaran sipil contohnya tempat ibadah. Ketiga, ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan negara. Keempat, aksi terorisme tidak

menghormati etika internasional. Serangan disengaja untuk membinasakan warga sipil dan melanggar hukum internasional.³⁶

4. *Lone-wolf*

Istilah *lone-wolf* berasal dari bahasa Inggris yang berarti “serigala tunggal”. Menurut Edwin Bakker dan Beatrice de Graaf, *lone-wolf* adalah individu yang bertindak sendiri, membuat niatnya sulit dideteksi karena cenderung menghindari interaksi dengan orang lain. Dibandingkan dengan kelompok terorisme atau teroris yang disponsori jaringan, operator tunggal memiliki keuntungan penting dalam menghindari identifikasi dan deteksi sebelum dan sesudah serangan mereka karena sebagian besar dari mereka tidak mengomunikasikan rencana mereka dengan orang lain.³⁷ Dari pengertian yang telah dipaparkan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa pengaturan merupakan suatu tindakan untuk mengatur pelaku baik yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pembuatan konten yang merupakan suatu informasi pada media yang berbasis internet dengan menyebarkan pemahaman terorisme, untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat memicu semangat seseorang yang telah terpapar paham-paham terorisme

³⁶ Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004, hlm 24.

³⁷ Edwin Bakker dan Beatrice de Graaf, “Preventing Lone Wolf Terrorism: some CT Approaches Addressed,” *Perspectives on Terrorism* 5, no. 5/6 (2011):hlm 46.

untuk melakukan hal tersebut secara individu dalam menyiapkan dan melakukan aksi tersebut atau biasa disebut.

E. Landasan Teoritis

Dalam menganalisis permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian yang terkait dengan aksi *lone-wolf*, penulis menggunakan kerangka teori yaitu:

1. Teori Perbandingan Hukum

Kedudukan perbandingan hukum dalam disiplin ilmu hukum merupakan suatu metode atau bahan perbedaan atau persamaan antara sistem hukum satu dengan sistem hukum lainnya. Menurut Rane David dan Brierley manfaat dari menggunakan perbandingan hukum yaitu, sebagai bahan penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis, sebagai pengembangan untuk hukum kita sendiri dan sebagai pembantu dalam mengembangkan pemahaman yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.³⁸

Identifikasi aksi *lone-wolf terrorism* melalui metode perbandingan hukum dapat mengemukakan bagaimana sistem negara lain dalam menangani aksi ini. Perbandingan hukum akan menganalisis bagaimana perumusan regulasi yang mungkin dapat diadopsi oleh sistem hukum di Indonesia.

³⁸ Andi Safriani, "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurnal Jurisprudentie* 5, no. 2 (2018): hlm 23-31.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban didasarkan pada asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*geen strafzonder schuld*). Meskipun asas ini tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, ia diterapkan dalam praktik hukum. Kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan tidak dapat dipisahkan. Hanya orang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan yang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatannya.³⁹

Pompe berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab bukanlah unsur konstitutif dari setiap tindak pidana, melainkan dianggap sudah ada (*voorondersteld*) pada setiap tersangka. Pemeriksaan mendalam hanya dilakukan jika ada indikasi bahwa terdakwa mengalami gangguan mental atau keterbelakangan perkembangan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana. Sedangkan, menurut D. Simons, pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya harus dianggap sebagai prasyarat adanya kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pertanggungjawaban semacam itu hanya dapat disyaratkan jika tidak ada keraguan. Namun, pada dasarnya, kemampuan seseorang

³⁹ Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (1 Agustus 2018): hlm 198, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>.

untuk bertanggung jawab atas perbuatannya merupakan elemen yang melekat dalam setiap tindak pidana.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan keadilan. Pertanggungjawaban ini muncul melalui celaan objektif terhadap suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif ditujukan kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dikenai pidana atas perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana terletak pada asas legalitas, sedangkan dasar untuk memidanakan pelaku didasarkan pada asas kesalahan. Menurut Muladi, Unsur-unsur kesalahan (dalam arti luas) meliputi: a) Kemampuan bertanggung jawab pelaku, yaitu kondisi kejiwaan pelaku harus normal; b) Hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, berupa kesengajaan atau kealpaan; c) Tidak adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan, seperti alasan pemaaf.⁴¹

Selanjutnya, terdapat dua pandangan utama, yaitu pandangan *monistis* dan *dualistis*. Pandangan *monistis*, seperti yang dikemukakan oleh Simons, mendefinisikan "*strafbaar feit*" sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu, pandangan *dualistis* pertama kali

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 197.

⁴¹ Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming," *Lex Crimen* 4, no. 5 (10 Agustus 2015): 124, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9015>.

diperkenalkan oleh Herman Kontorowicz. Ia menentang konsep kesalahan (*Schuld*) yang dominan pada masanya, yang disebutnya sebagai "*Objektive Schuld*." Dalam pandangan ini, kesalahan dipahami sebagai sifat yang melekat pada perbuatan, bukan hanya pada pelaku.⁴²

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, berikut penulisan diuraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini:

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁴³ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut dapat berupa dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan analisis yuridis normatif. Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan

⁴² *Ibid*, hlm 125.

⁴³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): hlm 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

doktrin-doktrin seperti Undang-Undang, peraturan, keputusan pengadilan, serta literatur hukum.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam melakukan suatu penelitian ada tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Yaitu dengan memahami dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Yaitu dengan mengidentifikasi suatu konsep tertentu melalui studi terhadap pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang menghasilkan pemahaman, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Yaitu dengan menganalisis semua kasus-kasus yang pernah terjadi, terkait dengan isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

⁴⁴ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 14, no. 1 (29 Juni 2015): hlm 84.

Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

d. Pendekatan Perbandingan Hukum

Yaitu membandingkan sistem hukum, norma, atau regulasi di berbagai yurisdiksi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta dampaknya. Metode ini dimanfaatkan dalam penelitian hukum untuk menemukan solusi atas persoalan hukum, menilai efektivitas aturan, atau memahami pengaruh budaya, sejarah, dan kebijakan dalam perkembangan hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, sehingga bahan utama yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang bersumber dari studi pustaka (penelitian kepustakaan). Adapun jenis-jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas, yaitu:

- 1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Putusan hakim terkait masalah tindakan terorisme di Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber ini diperoleh dengan mempelajari literatur yang tidak termasuk dokumen resmi, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, berbagai situs web di internet, skripsi, tesis, dan disertasi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum primer dan sekunder, yakni:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan dalam skripsi ini adalah dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam konteks ini bertujuan agar dapat menegaskan bahwa tidak ada penduplikasian terhadap penelitian sebelumnya. Namun, penelitian ini berisikan telaah dari hasil penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan juga pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai sumber yang ada, penelitian ini berhubungan dengan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul, "Pergeseran Orientasi Gerakan Terrorisme Islam di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015)" yang ditulis oleh Muhammad Subhan dengan memaparkan bahwa telah terjadinya pergeseran orientasi dari kelompok terorisme menjadi menjadi terorisme individu atau *lone-wolf*. Persamaan yang dimiliki dari penelitian ini adalah memiliki pendekatan kasus dengan merangkum gerakan terorisme dari Tahun 2000-2015. Selain itu, yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah mengkaji bukan hanya dari pergeseran kasus juga namun dengan aspek lain yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penelitian dengan judul, “Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman *Lone Wolf Terrorism* di Jawa Barat” yang ditulis oleh Tiara Firdaus Fajar, Arfin Sudirman dan Affabile Rifawan. Penelitian ini mengkaji terkait pergeseran terorisme menjadi *lone-wolf* di Jawa Barat. Persamaan dari penelitian ini memiliki pendekatan penelitian yang sama yaitu kasus dan konseptual. Sedangkan pembeda dari penelitian ini adalah terkait metode penelitian hukum empiris di Jawa Barat.
3. Penelitian dengan judul, “*Preventing Lone Wolf Terrorism: some CT Approaches Addressed*” yang ditulis oleh Edwin Bakker dan Beatrice de Graaf. Dalam penelitian ini berisi konsep terjadinya *lone-wolf* dan menjelaskan modus operandi *lone-wolf*. Mempertanyakan kehadiran terorisme, dampak serta menjelaskan tantangan dalam *lone-wolf* adalah persamaan dari penelitian ini. Sedangkan perbedaannya adalah mengkaji tidak hanya dari eksistensinya saja namun dari dasar hukumnya dan kriminologisnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penulisan skripsi ini diusulkan secara teratur dan sistematis yang dimuat dalam suatu sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika

penulisan. Pembahasan pada bab I dimasukkan sebagai pengantar dan pedoman dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME DAN AKSI *LONE-WOLF*

Bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana terorisme, dasar hukum tindak pidana terorisme dan aksi *lone-wolf*. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

BAB III ANALISIS AKSI *LONE-WOLF* TERRORISM DALAM PERATURAN HUKUM

Dalam bab ini dibahas mengenai analisis aksi *lone-wolf terrorism*, motif pelaku dan perbandingan hukum. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapat kesimpulan pada bab ke empat.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan serta saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.